



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan

Triwulan II

2024



KATA PENGANTAR



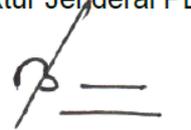
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan ekspor. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan II tahun 2024 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 105,36 (Kategori Baik).

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 30 Juli 2024

Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaramah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 23 indikator kinerja yang terdiri dari 8 Indikator yang kegiatan bersifat triwulanan, empat bersifat semesteran, dan 11 bersifat tahunan.

Sebanyak 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 105,36% (kategori Baik).

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. 13 indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan, (3) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (4) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.

2. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
3. Delapan indikator kinerja yang bersifat triwulanan dengan presentase capaian terhadap triwulan II tahun 2024 yaitu :
 - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan capaian (81,14%);
 - b. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan dengan capaian 114,44%;
 - c. Kinerja Logistik Hasil Perikanan (100,00%);
 - d. Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program (180,91%);
 - e. Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP 136,58%;
 - f. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (114,76%);
 - g. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (110,80%);
 - h. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (141,84%).
4. Empat indikator kinerja yang bersifat semesteran dengan presentase capaian terhadap triwulan II tahun 2024 yaitu :
 - a. Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing deng(139,60%);
 - b. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 100,14%;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (109,72)
 - d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (107,66%)
5. Satu indikator kinerja yang belum mencapai target triwulan II tahun 2024 yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 81,14% terhadap target Triwulan II Tahun 2024.

- 
6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp58.301.389.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp328.597.762.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp105.200.629.694,- atau setara dengan 27,19% terhadap total pagu anggaran awal atau 32,02% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTARI	I
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
E. Permasalahan Utama	6
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	21
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	21
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	21
Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkatkan.....	30
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	30
3. Konsumsi Ikan	39
Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan	45
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	45
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	52
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program.....	58
7. Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP.....	65
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.....	66
Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkatkan.....	68
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	68
Sasaran 5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP.....	72
10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	72

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP.....	74
12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	77
13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP.....	80
14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	83
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP.....	85
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	87
17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	89
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	91
19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	92
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP.....	94
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	96
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP.....	98
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.....	102
C. Realisasi Anggaran.....	105
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	107
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	108
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.....	109
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023	16
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2024.....	19
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	22
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	30
Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan II Tahun 2024.....	31
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan II Tahun 2024	32
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan.....	39
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	47
Tabel 9. Nilai Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	45
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	54
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	59
Tabel 12. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023	60
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	65
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	66
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	69
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP	73
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	75
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.....	78
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	81
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	84
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	85
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	88
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang	

Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	90
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	91
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	93
Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP.....	95
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP.....	97
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	99
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.....	103
Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2024.....	105
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.....	106
Tabel 32. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan II Tahun 2024	108
Tabel 33. Tindak Lanjut Rekomendasi pada laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024	109

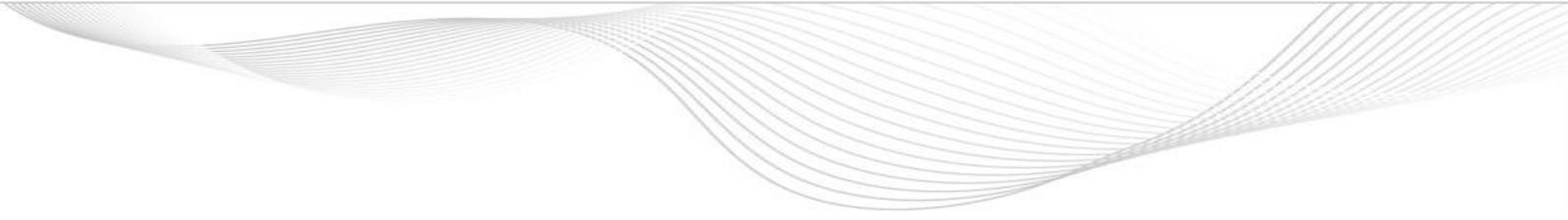
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	6
Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	11
Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024	18
Gambar 6. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	24
Gambar 6. Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO	23
Gambar 7. Penyusunan Naskah Urgensi Penyelematan Susut dan Sisa Pangan I	24
Gambar 8. Pembinaan Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klungkung Bali dan Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM. 25	
Gambar 9. Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah	26
Gambar 10. Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI serta FGD pembuatan scoresheet sensori	27
Gambar 11. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP sampai TW II Tahun 2024.....	27
Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	28
Gambar 13. Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP.....	29
Gambar 14. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP	30
Gambar 15. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan IV Tahun 2023.....	33
Gambar 16. Perundingan WG TIG IEU-CEPA	36
Gambar 17. Perundingan Indonesia - Tunisia Preferential Trade (IT CEPA).....	37
Gambar 18. Pembangunan Aplikasi Market Intelligence	37
Gambar 19. Kegiatan Promosi pada NUSATIC 2024	39
Gambar 20. Pengembangan <i>tools</i> penghitungan AKI Tahunan melalui Network Engine by Google Services (Neng Geulis	41
Gambar 21. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Kab. Nganjuk dan Madiun	42
Gambar 20. Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan di Garut	44
Gambar 21. Verifikasi Lapangan di Kabupaten Sukabumi	45
Gambar 22. Capaian Nilai Investasi KP berdasarkan Sumber Permodalan Periode II Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)	47
Gambar 23. FGD Sinkronisasi Data Potensi dan Peluang Investasi Komoditas Tuna... 49	

Gambar 24. Kegiatan Benchmarking industri pengolahan tuna di Kota Bitung Provinsi Sulawesi utara	49
Gambar 25. Dokumen Peluang investasi Ready to Offer Industri Pengolahan Ikan Tuna Terintegrasi.....	49
Gambar 27. kegiatan Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024	50
Gambar 28. Kegiatan <i>Indonesia Tuna Investment and Business Forum</i> (ITIBF) 2024	51
Gambar 29. Kegiatan Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).....	42
Gambar 30 Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)	55
Gambar 31 Sosialisasi Implementasi Sistem resi Gudang	59
Gambar 32 Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Penangkap Ikan	59
Gambar 33 Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024	62
Gambar 34. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan bidang usaha	63
Gambar 35. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Usaha hasil KP di Kabupaten Tuban	65
Gambar 36. Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Wirausaha Baru serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	65
Gambar 37. Fasilitasi Akses Permodalan di Tuban	66
Gambar 38. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Banyuwangi provinsi jawa timur dan Pasaran provinsi Lampung....	66
Gambar 39. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP	70
Gambar 40. Workshop penghitungan NTPHO	73
Gambar 41. Validasi dan Penghitungan NTPHP 2024 Semester I	66
Gambar 42. Penguatan Budaya Kerja ASN	76
Gambar 43. Koordinasi penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi	79
Gambar 44. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	81
Gambar 45 .Bimbingan teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN ...	81
Gambar 46 Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan	82
Gambar 47 Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen PDSPKP	82
Gambar 54 Pembahasan Mekanisme Penilaian SAKIP dan Penyusunan Pedoman SAKIP Tahun 2024	84



Gambar 55 Penyusunan Laporan kinerja Ditjen PDSPK.....	85
Gambar 56 Penyusunan laporan bantuan Ditjen PDSPK	100
Gambar 57 Rapat pembahasan pola pengelolaan keuangan BLU.....	103
Gambar 58 Rapat pembahasan Pengelolaan Ikan Hiasa Cibinong dengan BRIN	103
Gambar 59 Rapat <i>Review</i> Pelaksanaan Validasi Satudata Bidang PDSPK Tahun 202.....	106
Gambar 60 Workshop Satu Data Bidang PDSPK Tahun 2024.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data

capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan II Tahun 2024 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

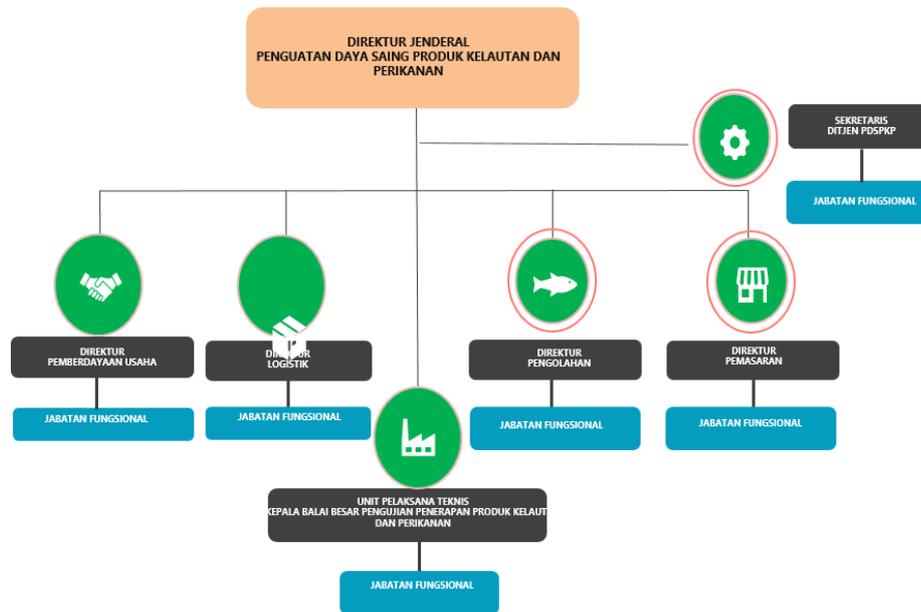
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik

- produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

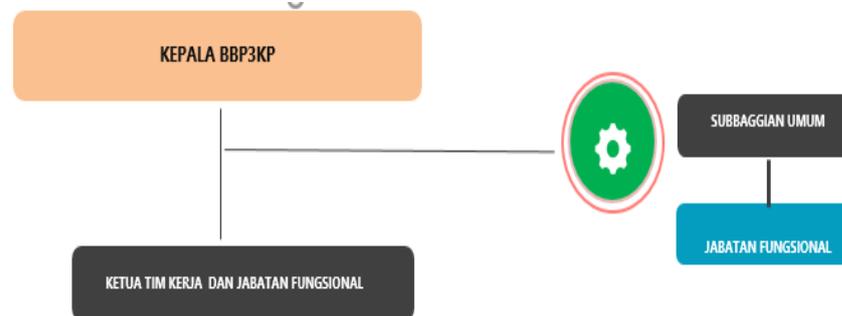
Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;

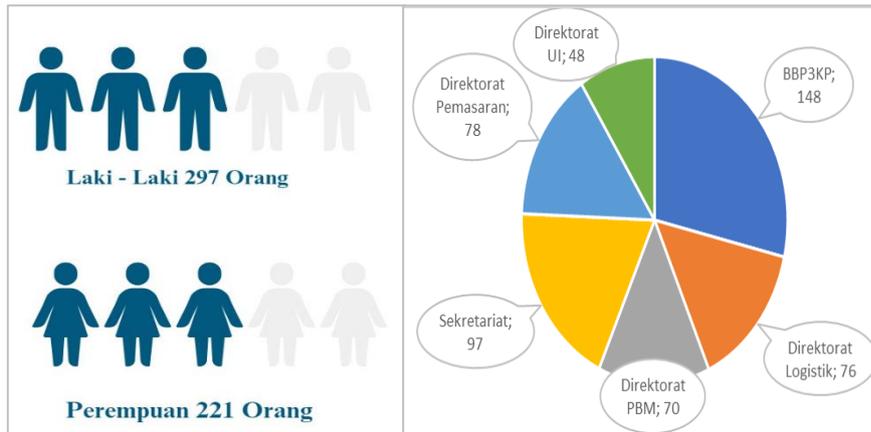
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 221 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3 Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan

yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkan masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan

pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini

terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP
 Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

BAB	BAB	BAB	BAB	BAB
01	02	03	04	05
Pendahuluan Menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP, dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP	Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2024 dan analisisnya	Penutup Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya	Lampiran Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lain yang dianggap perlu

Gambar 4 Sistematis Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah;
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik;
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :

- Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;
 - Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk:
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan pengusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan dirumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.

5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan;
- Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor);

Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional;

Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam

rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat;

Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar;
- Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil;
- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

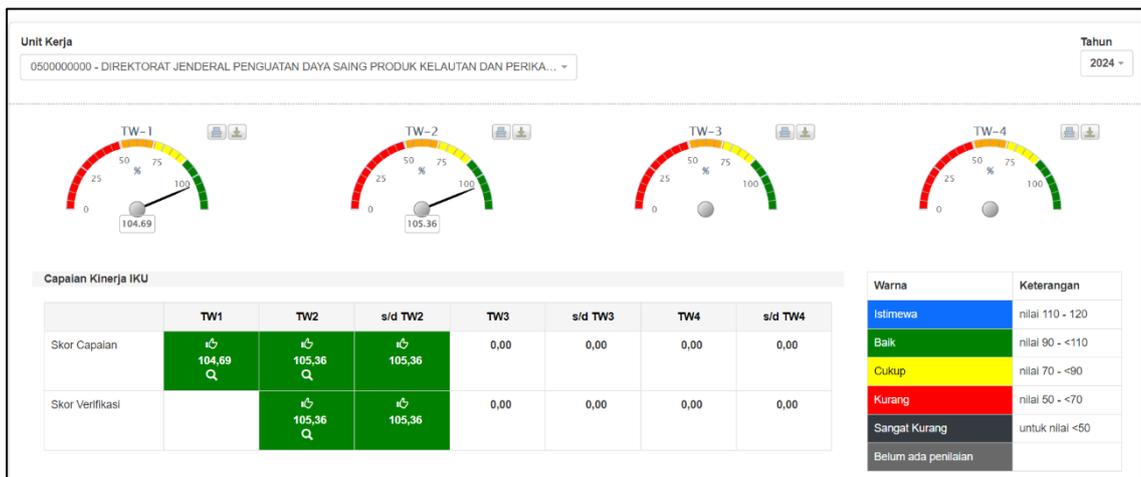
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59
3	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76
		17.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 105,36. Capaian NKO pada triwulan ini mengalami peningkatan 0,64% dibandingkan dengan capaian NKO pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 104,69. Capaian NKO pada triwulan II sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5 NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW II 2024	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2024	TW II 2024		Tahun 2024	TW II 2024	
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5	2,5	3,49	46,53%	139,60%
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2	3,34	2,71	37,64%	81,14%
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59	0	0	-	-
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9	4,5	5,15	57,22%	114,44%
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9	71,9	71,9	100,00%	100,00%
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26	2,2	3,98	38,79%	180,91%
7	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62	3,8	5,19	68,11%	136,58%
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000	16.705,00	19.170,00	29,05%	114,76%
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	104,75	104,9	100,14%	100,14%
10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2	0	0	-	-
11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,3	0	0	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87	75	82,29	94,59%	109,72%

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW II 2024	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2024	TW II 2024		Tahun 2024	TW II 2024	
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84	0	0	-	-
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	0	0	-	-
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	80	88,64	110,80%	110,80%
16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76	0	0	-	-
17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	141,84%	141,84%
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76	83	89,36	95,31%	107,66%
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	0	0	-	-
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	0	0	-	-
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	0	0	-	-

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW II 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW II 2024		Tahun 2024	TW II 2024
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	0	0	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91	0	0	-	-

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan dengan terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, Jenis Kegiatan Pengolahan dibagi menjadi 13 yaitu: (1) Pendinginan/pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3)

Pengaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemangangan ikan, (6) Peragian/fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/*jelly* ikan atau surimi, (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, (10) Pembuatan minyak ikan, (11) Pengolahan rumput laut, (12) Pengolahan lainnya, (13) Penanganan ikan.

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	2,5	-	-	7,5	3,49	-	-	3,49	139,60	46,53	-	-

*angka prognosa capaian 2024
Sumber Data: Ditjen PDSPKP

Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing pada tahun 2024 triwulan II mencapai 3,49 juta ton. Capaian dimaksud setara dengan 139,60% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 2,5 juta ton atau 46,53% terhadap target tahun 2024 sebesar 7,5 juta ton. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Volume produk olahan kelautan dan perikanan sebesar Rp26.618.820.000,- sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp8.346.369.511,00 atau setara dengan 31,36%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan penyusunan RSNi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komite tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Sampai dengan triwulan II telah melaksanakan pembahasan 7 RSNi1 Produk Perikanan Non Pangan yaitu (1) Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) - syarat mutu dan penanganan, (2) Ikan hias cardinal - syarat mutu dan penanganan (3) Ikan hias mas koki - *Carassius auratus* – Syarat mutu dan penanganan (4) Ikan hias guppy (*Poecilia spp*) - Syarat mutu dan penanganan (5) Bubuk ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan dan (6) Ikan hias rainbow (*Melanotaenia spp*) - syarat mutu dan penanganan Spirulina spp kering – syarat mutu dan pengolahan.

Selain itu dilakukan juga Rapat Teknis RSNi2 pada 10 Produk Perikanan antara lain (1) Ikan renyah, (2) Bandeng duri lunak, (3) Ikan asap dengan pengasapan dingin, (4) Kerupuk ikan, udang dan moluska, (5) Bandeng isi, (6) Kukis ikan, (7) Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara, (8) Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, (9) Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS), (10) Hidrolisat Protein Ikan.

- b. Melaksanakan kegiatan Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ Sertifikat *good manufacturing practiprofillingce* (GMP) melalui Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Rapat Pembentukan Sistem

Pembinaan Berbasis ISO 9001, dan Koordinasi Pembina Mutu Terdaftar. Pada periode triwulan II jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 962 sertifikat sehingga sampai dengan periode triwulan II jumlah total SKP yang telah diterbitkan sebanyak 2.009 sertifikat.



Gambar 6. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- c. Melaksanakan Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan melalui beberapa kegiatan antara lain perhitungan losses hasil perikanan di Jawa Timur, melaksanakan rapat sinergi Program dan kegiatan Industrialisasi pindang rangka meningkatkan daya saing produk pindang (ikan pindang naik kelas) serta melaksanakan rapat penyusunan naskah urgensi penyelesaian susut dan sisa pangan dalam rangka pengelolaan susut dan sisa pangan agar dapat dimanfaatkan kembali untuk ketahanan pangan.



Gambar 7. Penyusunan Naskah Urgensi Penyelesaian Susut dan Sisa Pangan I

- d. Pembangunan unit pengolahan ikan bernilai tambah menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai dengan triwulan II tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah reviu dokumen perencanaan dan penyiapan dokumen-dokumen lelang, dan sosialisasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang dilaksanakan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Terkait konstruksi/Pembangunan masih pada proses identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan rencana pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu Ditjen PDSPKP juga melakukan Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak untuk menjamin keamanan produk hasil perikanan.
- e. Melaksanakan Pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Sampai dengan periode triwulan II telah tercapai 820 UMKM yang dibina di lokasi Bali, Banten, Bengkulu, DI Aceh, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Gambar 8. Pembinaan Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klungkung Bali dan Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM

- f. Melaksanakan Pembinaan UPI skala menengah besar melalui koordinasi dan diskusi dengan melakukan kunjungan lapang ke UPI di Jawa Timur, melaksanakan FGD Peningkatan Produktivitas UPI Pengalengan dan Kunjungan lapangan ke beberapa UPI Pengalengan Ikan. Pada triwulan II telah tercapai 220 UPI sehingga sampai dengan periode triwulan II telah tercapai 260 UPI yang dibina.
- g. Melaksanakan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk untuk membina pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan di 7 lokasi yaitu di Kabupaten Maluku Tengah, Melawi, Magelang, Kupang, Aceh Tenggara, Kubu Raya dan Jombang pada periode April – Juni 2024. Sampai dengan periode triwulan II telah tercapai 375 UMKM yang dibina.



Gambar 9. Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah

- h. Melaksanakan Penyiapan Bahan RSNI hasil Kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI : (1) kerupuk ikan, udang dan molusca pada PT Sekar Laut, PT Legong Bali Sejahtera, UMKM Nurlaela dan Poklhasar Sentak Mandiri, (2) Ikan Renyah pada UKM Iwak Koe, UKM Bahtera Rahayu, UKM Tiga Putra, UKM Bintang Karunia, UKM Hamada Food Lestari, (3) Bandeng Duri Lunak UKM Bandeng Presto Bu Rita, UKM Bandeng Presto Patera, Poklhasar Mitra Usaha, Poklhasar Rahayu dan Poklhasar Sari

Laut, (4) Bandeng Isi pada UKM Bilvie dan Poklahsar Ratu Toety. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan FGD pembuatan *scoresheet* sensori analisis untuk Ikan renyah tanggal 29 Mei dan 11 Juni 2024, dan sensori analisis untuk Bandeng Isi pada tanggal 4 Juni 2024.



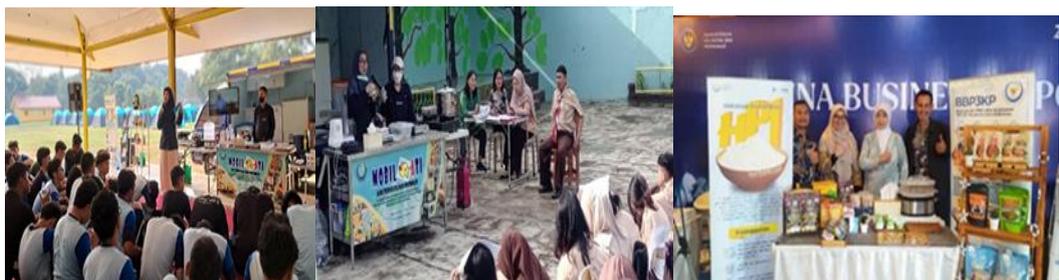
Gambar 10 Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI serta FGD pembuatan *scoresheet* sensori

- i. Melaksanakan layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan daya saing produk olahan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, capaian kegiatan jumlah produk kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji sebanyak 383 produk dari target 263 produk, dengan rincian 55 produk yang disertifikasi dan 328 produk yang diuji.



Gambar 11 Peta Sebaran Lokasi Produk Kelautan dan Perikanan yang Disertifikasi periode TW II Tahun 2024

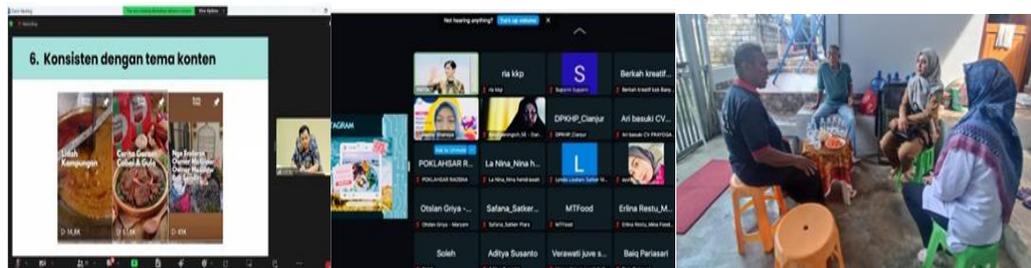
- j. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan: (a) Pencetakan media informasi berupa backdrop BBP3KP Expo; panel sebanyak 5 (lima) judul (Penggunaan Peralatan Pengolahan, Bimtek Pengolahan Produk KP, Penerapan Pengembangan Produk Perikanan Bernilai Tambah, Miniplant Tuna, dan Mobil ATI); leaflet 3 judul (Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP, Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP, Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan Produk); fotobooth dalam rangka mendukung pelaksanaan sekaligus menyediakan sarana penyebarluasan informasi pada kegiatan BBP3KP Expo, (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan Triwulan II dilakukan pada 16 event diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yang tersebar di Jakarta, Cibubur, Cibinong, Tulungagung, Depok, Cirebon, Surabaya dan Semarang. Pada triwulan II event diseminasi dilaksanakan di Jakarta (International Expo (JIExpo), GMB 3, SMA Trisoko), Cibubur (Bumi Perkemahan Cibubur), Tulungagung, Depok (SMK Al Muhtadin Depok), Cirebon (LPD Al Bahjah Buyut), Surabaya (Hotel JW Marriot Surabaya) dan Semarang dengan total penerima informasi sampai dengan bulan Juni yaitu 570 orang;



Gambar 12. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikan

- k. Melaksanakan Pengembangan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP yang meliputi Pelatihan digital marketing, *copywriting* (*sales letter*), strategi optimalisasi penjualan di Marketplace (Shopee, Tokopedia, Tiktokshop dll), *Training smartphone* (foto & videografi) produk untuk kebutuhan promosi di channel digital; Fasilitasi expo produk tenant inkubasi bisnis invapro KP

pada BBP3KP Expo di event International Indonesia Seafood And Meat (IISM) Expo tahun 2024; Pembuatan desain promosi produk dan bisnis menggunakan aplikasi canva; Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP.



Gambar 13 Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP

- I. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP pada triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan berupa (1) Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan kepada 20 UMKM penerap PPNT; (2) Kegiatan kerjasama teknologi pengolahan dan pemasaran sebagai tindak lanjut pengembangan kegiatan teknologi pengolahan yang bekerjasama dengan para akademisi, Dinas KP Provinsi Kabupaten/Kota, pelaku usaha perikanan dan stakeholder berupa rapat pembahasan tentang hilirisasi komoditas nila salin mendukung modelling budidaya nila salin berbasis, rapat penyusunan urgensi UPT bidang penerapan produk bioteknologi dan biofarmakologi kelautan dan perikanan, rapat penyusunan naskah urgensi UPT bidang mekanisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan (3) Bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan berupa kegiatan *In House Training* dengan tema "Teknik Sterilisasi Komersial Produk Perikanan yang dikalengkan", dan bimbingan serta penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2024 di Lavender Room Ole Suite Cottage,

Kawasan Darmawan Park dengan materi pengolahan yang dilakukan adalah churos ikan, tuna luncheon dan gyoza ikan tuna.



Gambar 14 Fasilitas pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP

Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	3,34	1,67	3,13	7,2	2,71	1,45	2,69	2,71	81,14	37,64	86,90	1,00

*angka sementara s.d Bulan Juni 2024

Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia Triwulan II tahun 2024 mencapai USD 2,71 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 81,14% terhadap target triwulan II tahun 2024 (USD 3,34 miliar) dan 37,64% terhadap target jangka menengah

tahun 2024 (USD 7,2 miliar). Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar USD 1,45 miliar maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 86,90% dan meningkat 1,00% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 2,69 miliar.

Tabel 5 Capaian Ekspor Periode Triwulan II tahun 2023-2024

BULAN	Volume (Ribu ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Januari	92,06	121,73	32,2%	442,59	527,71	19,2%
Februari	86,90	97,63	12,3%	414,99	430,43	3,7%
Maret	105,88	114,76	8,4%	503,20	497,25	-1,2%
April	80,38	86,11	7,1%	382,32	363,67	-4,9%
Mei	102,11	110,10	8,6%	507,21	481,00	-4,7%
Juni	88,24	127,23	44,2%	437,01	411,75	-5,8%
TOTAL	555,57	658,30	18,5%	2.687,33	2.714,33	1,0%

*angka sementara s.d Bulan Juni 2024
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Pada periode yang sama, ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 2,99% dan ekspor Indonesia secara keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 6,65% (BPS, 2024). Nilai ekspor hasil perikanan Triwulan II tahun 2024 berkontribusi sebesar 13,00% terhadap nilai ekspor nasional sebesar USD20,64 miliar (angka sementara) atau 13,82% terhadap nilai ekspor non migas Triwulan II tahun 2024 yakni sebesar USD19,61 miliar (BPS, Juni 2024).

Tabel 6 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan II Tahun 2024

Komoditas Utama	Volume (Ribu ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Udang	110,42	122,04	10,5%	874,54	755,79	-13,6%
Tuna-Cakalang-Tongkol	97,02	114,92	18,5%	435,55	456,64	4,8%
Cumi-Sotong-Gurita	60,66	84,85	39,9%	295,83	396,94	34,2%
Rajungan-Kepiting	14,69	20,96	42,6%	225,53	275,15	22,0%
Rumput Laut	113,77	120,35	5,8%	245,67	162,38	-33,9%
Lainnya	159,02	195,19	22,7%	610,21	667,44	9,4%
TOTAL	555,57	658,30	18,49%	2.687,33	2.714,33	1,0%

*angka sementara s.d Bulan Juni 2024
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Tabel 6 menunjukkan Komoditas utama ekspor pada periode Januari-Juni 2024 meliputi Udang sebesar USD 755,79 juta (27,8% terhadap total ekspor Indonesia), Tuna- Cakalang-Tongkol (TCT) USD 456,64 juta (16,8%), Cumi-Sotong-Gurita (CSG) USD 396,94 juta (14,6%), Rajungan-Kepiting USD 275,15 Juta (10,1%) dan Rumput Laut USD 162,38 Juta (6,0%). Penurunan ekspor terjadi pada komoditas udang dan rumput laut, sedangkan ekspor TCT, CSG dan Rajungan-Kepiting mengalami peningkatan.

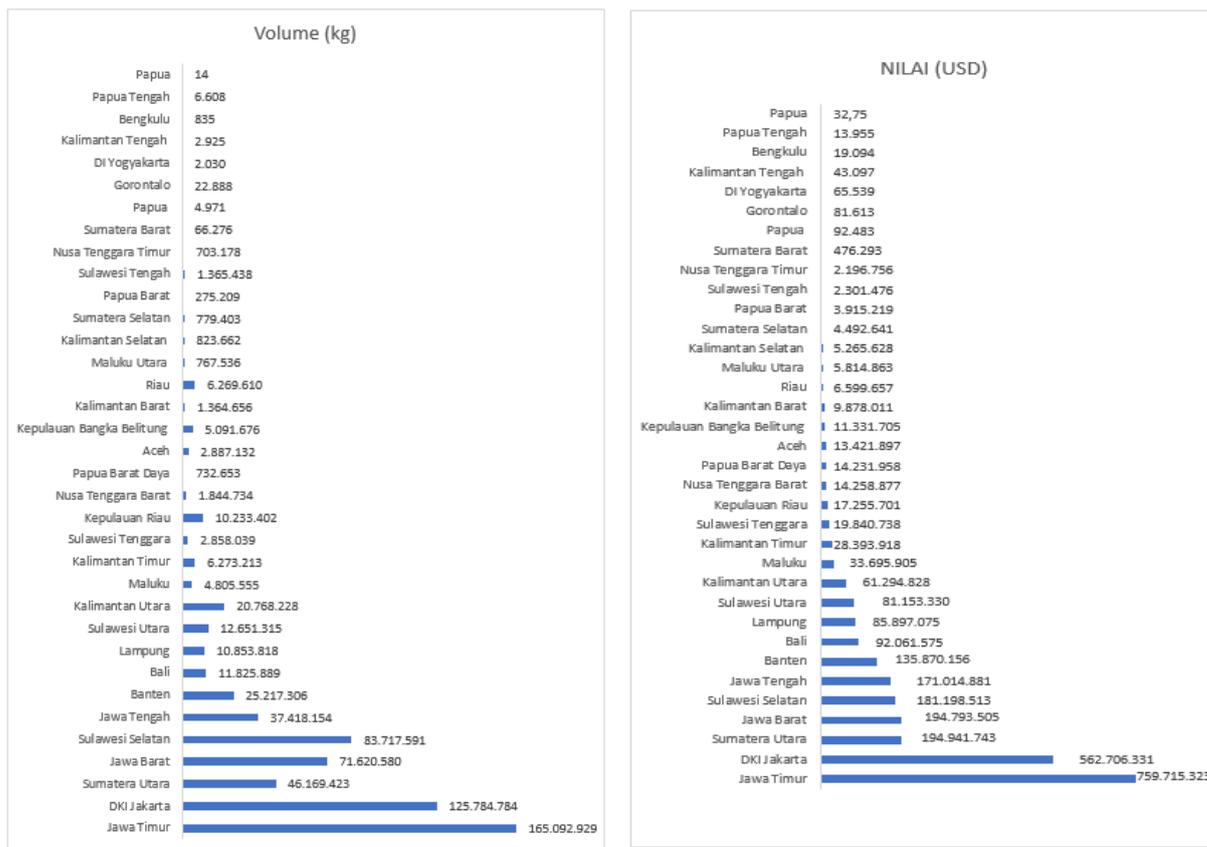
Tabel 7 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan II Tahun 2024

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Amerika Serikat	100,75	15,30	889,39	32,77
Tiongkok	223,38	33,93	556,04	20,49
ASEAN	121,62	18,47	353,93	13,04
Jepang	76,49	11,62	285,47	10,52
Uni Eropa	36,11	5,49	193,35	7,12
Lainnya	99,94	15,18	436,14	16,07
Total	658,30		2.714,33	

*angka sementara s.d Bulan Juni 2024

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan sebagaimana Tabel 7, nilai ekspor produk perikanan terbesar adalah Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 889,39 juta (32,8% dari total ekspor produk perikanan Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 556,04 juta (20,5%), ASEAN USD 353,93 juta (13,0%), Jepang USD 285,47 juta (10,5%), dan Uni Eropa USD 193,35 juta (7,1%). Dari kelima negara tersebut hanya tujuan ekspor ke Tiongkok, ASEAN dan Uni Eropa yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



*angka sementara s.d Bulan Juni 2024

Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 15 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 27,99%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 20,73%, dan Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 7,18%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan Triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2024 secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juni 2024 mencapai US\$125,09

miliar atau turun 2,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US\$117,19 miliar juga turun 2,99 persen.

b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Adapun rincian penurunan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar AS sebagai berikut :

- 1) Total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS hingga Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 7,5% menjadi USD 889,39 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 961,35 juta.
- 2) Total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang hingga Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 16.00% menjadi USD 285,47 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 339,80 juta.
- 3) Nilai ekspor udang pada triwulan II tahun 2024 sebesar USD 755,79 juta, turun sebesar USD 118,75 juta (13,60%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
- 4) Nilai ekspor rumput laut pada triwulan II tahun 2024 sebesar USD 245,67 juta, turun sebesar USD 83,29 ribu (33,9%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. (Sumber data: Ditjen PDSPKP diolah dari Trademap.org).

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan periode ke depan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya;
- b. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan *Anti-dumping*.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar Rp9.285.522.000,- sampai

dengan periode Triwulan II tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp5.133.047.723,00 atau setara dengan 55,28%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan II Tahun 2024, antara lain:

a. Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan;

Sistem bursa pasar ikan merupakan sistem berbasis *website* yang memberikan fasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi poklaha UKM dan Non-UMKM terkait persyaratan dan prosedur ekspor dan dapat diakses melalui alamat <https://bursaikan.kkp.go.id/>. Tujuan dari bursa pasar ikan adalah mendorong hilirisasi dengan target agar UMKM dapat naik kelas dan mampu melakukan ekspor produk kelautan dan perikanan. pada periode triwulan II Ditjen PDSPKP sistem ini masih dalam proses pengembangan pada error sistem, penyusunan materi promosi dan persiapan sosialisasi.

b. Pelaksanaan Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor melalui serangkaian kegiatan :

1) Pembahasan draft operational procedure protokol perubahan indonesia japan economic partnership agreement (IJEPA)

Kegiatan dimulai dengan *serangkaian rapat koordinasi dalam rangka membahas draft Operational Procedure Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang dilaksanakan pada 22 April dan 19 Juni 2024 serta penyampaian counter draft OP kepada Jepang pada tanggal 22 April dan 20 Juni 2024. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan tarif bea masuk tuna olahan ke Jepang yang semula sebesar 9,6% menjadi sebesar 0% sehingga dapat meningkatkan akses pasar tuna Indonesia ke Jepang.

2) Pertemuan intersesi diselenggarakan pada 24 April 2024 di Serpong Tangerang. Pertemuan intersesi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan Keikutsertaan pada perundingan Akses Pasar *Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)* Putaran ke-19 yang akan dilaksanakan pada 1 s.d 3 Juli 2024 di Bogor. Secara umum, UE telah menyampaikan penawaran (*offer*) penghapusan tarif untuk seluruh produk perikanan (532 pos tarif versi UE), baik penghapusan tarif 0% saat implementasi maupun secara gradual dalam 5 dan 7 tahun. Namun UE belum meliberalisasi 15 pos tarif olahan ikan (HS 1604) yang meliputi tuna-cakalang-tongkol, sarden, dan ikan olahan untuk surimi. Disamping akses pasar perdagangan barang, Ditjen PDSPKP juga turut mengawal perundingan dalam *Working Group Rules of Origin, Trade and Sustainable Development* dan *Sustainable Food System*.



Gambar 16 Perundingan WG TIG IEU-CEPA

3) Keikutsertaan pada Perundingan Intersesi ke-6 *Indonesia – Tunisia Preferential Trade (IT CEPA)* yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 April 2024 di Tangerang Banten. Perundingan ditargetkan untuk menyelesaikan draft text *Trade in Goods (TIG)*, terutama untuk *article on Classification of Goods and Transportation and the article on Counter Trade, Rules of Origin (RoO)*, dan pembahasan *market access (request/offer)*. Terkait sektor perikanan, pihak Tunisia menyampaikan agar menambahkan 2 pos tarif

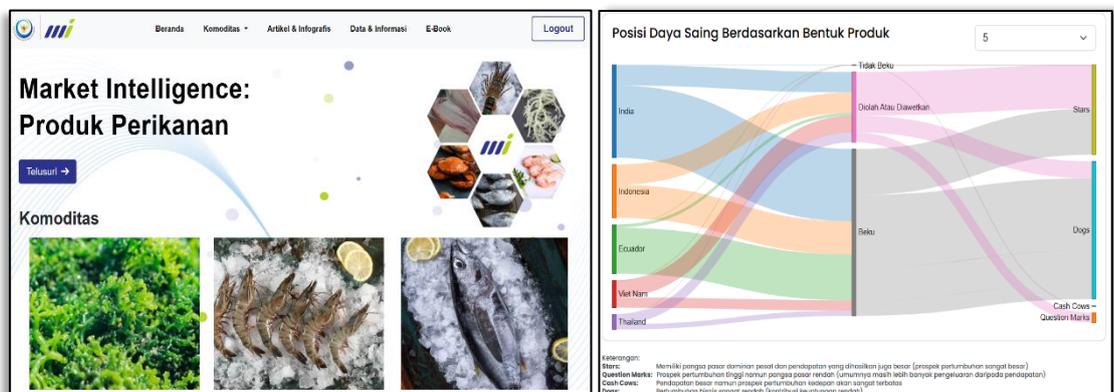
olahan kepiting yaitu olahan asap (HS 03069321) dan olahan lainnya (HS 03069329).



Gambar 17 Perundingan *Indonesia – Tunisia Preferential Trade (IT CEPA)*

c. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2024 meliputi Profil Pasar udang, Profil pasar Tuna, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut. Pada triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain

- 1) Peningkatan kapasitas personil melalui pelatihan *Training Program On International Fish Trade, Global Applicable Framework And Market Access* yang diadakan oleh FAO bekerja sama dengan Infish pada tanggal 4 s.d 6 Juni di Jakarta
- 2) Serangkaian rapat koordinasi pembangunan Aplikasi *Market Intelligence*. Aplikasi tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait pasar ekspor dan impor produk perikanan sehingga dapat memberikan strategi peningkatan akses pasar luar negeri.



Gambar 18 Pembangunan Aplikasi *Market Intelligence*

- 3) Rapat koordinasi penyusunan profil pasar luar negeri untuk komoditas tuna-cakalang-tongkol pada tanggal 14 Juni 2024 di Jakarta. Agenda dalam rapat tersebut membahas data dan informasi terkait perkembangan dan potensi pasar komoditas tuna global secara umum serta negara tujuan utama ekspor tuna guna mendukung kegiatan Tuna Business Forum tahun 2024
- d. Penyusunan Rekomendasi kebijakan pendampingan *major project* pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada periode triwulan II Ditjen PDSPKP telah mengikuti monitoring dan evaluasi PHLN di Hotel Cikini pada tanggal 18-19 April 2024. Dalam rapat dimaksud disampaikan bahwa pembangunan pelabuhan diarahkan untuk mendukung program Perikanan Ikan Terukur. Sampai dengan saat ini dalam proses Legal Answer atas Legal Questionare - JICA untuk kemudian akan ditindaklanjuti proses Loan Agreement oleh Kemenkeu.
- e. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional pada tanggal 7 s.d 9 Juni 2024 di ICE BSD melalui NUSATIC 2024 yang diselenggarakan Ditjen PDSPKP sebagai host berkolaborasi dengan PT. Akuatik Flona Nusantara Kreasi. Ditjen PDSPKP menyediakan paviliun seluas 160 m² untuk 7 (tujuh) UMKM, 3 (tiga) eksportir, SMKN 61 Kepulauan Seribu, dan Raiser Ikan Hias Cibinong. Komoditas yang dipamerkan antara lain ikan hias air tawar, ikan hias air laut, coral, aquascape, tanaman air, dan aksesoris akuarium. Selain itu juga dibuka

pelayanan informasi budidaya ikan hias, Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).



Gambar 19 Kegiatan Promosi pada NUSATIC 2024

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS. Penghitungan konsumsi ikan nasional merupakan angka konsumsi ikan per kapita (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-

*Angka sementara

Konsumsi ikan tahun 2024 ditargetkan sebesar 59,00 kg/kapita/tahun. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan

sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi Ikan dan perikanan sebesar Rp53.898.377.000,- sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp19.821.945.755,00 atau setara dengan 37,05%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi ikan antara lain:

- a. Penyusunan profil dalam negeri kelautan perikanan dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Penyusunan buku pedoman penghitungan angka konsumsi ikan, baik angka konsumsi ikan tahun 2023 maupun angka konsumsi ikan periode bulanan tahun 2024. Buku pedoman AKI Tahun 2023 menyampaikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menghitung AKI nasional, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023. Adapun buku pedoman AKI Periode Bulanan Tahun 2024 menyampaikan panduan bagi petugas pengolah data dalam menentukan sampel wilayah dan rumah tangga, metode pendataan, entri data, serta verifikasi dan validasi data AKI periode bulanan tahun 2024.
 - 2) Pengembangan *tools* penghitungan AKI Tahunan melalui Network Engine by Google Services (Neng Geulis). *Tools* penghitungan AKI Tahun 2023 dapat diakses pada tautan <http://bit.ly/nenggeulisakibulanan2024> yang memuat menu unduh data Susenas, konfirmasi data konsumsi ikan dalam rumah tangga, entri data data konsumsi ikan di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat, serta database AKI. Tampilan Neng Geulis AKI Tahun 2023 sebagai berikut.



Gambar 20 Pengembangan *tools* penghitungan AKI Tahunan melalui Network Engine by Google Services (Neng Geulis)

- b. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu pada kegiatan gemarikan dilakukan distribusi paket gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Pada periode triwulan II sebanyak 55 kegiatan promosi yang terdiri dari terdiri dari 50 promosi kegiatan Perluasan Safari Gemarikan, 2 promosi dari kegiatan Bazar dan 3 promosi pada media sosial gemarikan. 50 promosi kegiatan perluasan gemarikan dilaksanakan di Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Aceh Tenggara, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Mamuju, Kab.

Cirebon, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Sukabumi, Kab. Kubu Raya, Kab. Bone, Kab. Lampung Utara, Kota Bogor, Kab. Melawi, Kab. Musi Rawas, Kab. Tabanan, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto.



Gambar 21 Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Kab. Nganjuk dan Madiun

- c. Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri melalui Pelaksanaan Bazar dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, sekaligus mempromosikan produk – produk perikanan agar lebih dikenal luas. Sekaligus mendorong kemajuan UMKM di sektor perikanan untuk memperoleh sarana promosi dan pemasaran produknya lebih luas dengan target peningkatan omzet dan kesejahteraan pelaku UMKM di perikanan. Kegiatan bazar dilaksanakan selama 2 hari pada pukul 07.00-16.00 WIB di halaman parkir dan koridor Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat. Bazar Produk Perikanan bulan Mei dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Mei 2024 sedangkan bulan Juni dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Juni 2024.
- d. Pembangunan sentra kuliner ikan. Sentra kuliner merupakan bantuan Pemerintah berupa bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pemasaran kuliner dan pusat oleh-oleh berbahan baku ikan. Pembangunan sentra kuliner tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan nomor 19 tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (1) Desa Setono, Kota Pekalongan (2) Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi (3) Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban (4) Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang (5) Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi (6) Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang (7) Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat (8) Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe (9) Desa Kuala Raja, Kabupaten Bireuen (10) Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan periode triwulan II Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka identifikasi dan *feasibility* mendukung program penataan kampung nelayan modern. Berdasarkan hasil reviu, evaluasi, penilaian kesiapan serta kesiapan operasionalisasi yang meliputi penilaian aspek sosial untuk tahun anggaran 2024 pelaksanaan pemabngunan KALAMO sebagai modelling/percontohan hanya akan akan dilaksanakan di Desa Lateng Kabupaten Banyuwangi untuk KALAMO dengan pendekatan Sentra Kuliner Seafood. Pada triwulan II tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah melaksanakan Verifikasi lapangan dan koordinasi perencanaan yang dilaksanakan di Banyuwangi pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2024. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi, calon lokasi pembangunan Senkul Ikan merupakan kawasan pengembangan wisata dan kuliner yang merupakan tanah milik pemda seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ dengan 1 sertifikat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu KUB Pantai Ancol dan KUB Teluk Mandar yang sudah ada di area calon senkul dengan anggota kelompok pedagang sebanyak 65 pedagang.

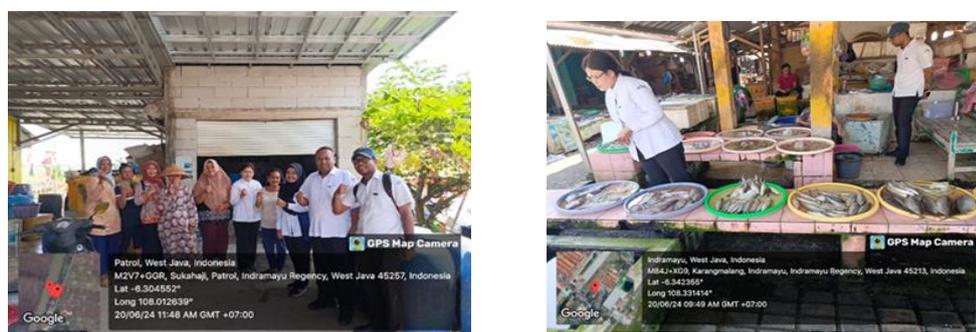
- e. Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan untuk memberikan pembinaan kepada pembina pasar (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pembinaan pedagang ikan dan/atau pengelola pasar ikan), pengelola pasar dan pedagang dalam rangka mewujudkan pasar ikan yang sehat, bersih, aman dan nyaman serta memenuhi kaidah sanitasi dan higienis. Pembinaan dapat

dilakukan melalui kunjungan langsung, pertemuan dengan pembina pasar, pedagang dan pengelola pasar atau menyampaikan melalui media sosialisasi yaitu poster, video, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penerapan SOP menuju pasar ikan yang memenuhi standar, antara lain: SOP pegelolaan pasar, SOP cara berjualan ikan yang baik, SOP kesehatan dan kebersihan pribadi pelaku pasar, serta pedagang ikan, SOP pembersihan dan sanitasi tempat berjualan ikan, SOP pengelolaan limbah/sampah, SOP pembongkaran ikan segar di area pasar ikan, SOP cara memajang (display) ikan segar dan SOP penyimpanan ikan. Pada periode triwulan II pembinaan lembaga pengelola pasar dilaksanakan pada 25 lembaga yaitu : (1) Pasar Baru Wadungsari Sidoarjo, (2) Pasar Bersih Singkawang, (3) Pasar Binuangan Lebak, (4) Pasar Ciluar Bogor, (5) Pasar Cipahit Bandung, (6) Pasar Ikan Bersih kota Padang, (7) Pasar Ikan Indramayu. (8) Pasar Ikan Prabumulih, (9) Pasar Ikan Subang, (10) Pasar Induk Palembang, (11) Pasar Kota Sampang, (12) Pasar Lubuk Buaya Kota Padang, (13) Pasar Ikan Bersih Banyuwangi, (14) Pasar Jagasatru Cirebon, (15) Pasar Raya Kota Padang, (16) Pasar Rebo Purwakarta, (17) Pasar Soponyono Surabaya, (18) Pasar Terpadu Kutacane, (19) Pasar Ciawitali Garut, (20) Pasar Mandala Giri Garut, (21) Pasar Ikan Jembrana, (22) Pasar Ikan Tabanan, (23) Pasar Ikan Kedonganan, (24) Pasar Modern Bintaro, (25) Pasar Ikan Bersih Boyolali.



Gambar 20 Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan di Garut

- f. Pengadaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pada Tahun 2024 Ditjen PDSPKP mengalokasikan sebanyak 6.000 unit sarana pemasaran *cool box*. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah menerbitkan SK Penerima untuk 2088 unit coolbox untuk 117 kelompok di Tahap I. Verifikasi lapangan di berbagai daerah telah dilakukan dalam rangka percepatan pengadaan bantuan sarana pemasaran (*cool box*) di beberapa lokasi antara lain: (1) Kabupaten Aceh Tenggara, (2) Kabupaten Cilacap, (3) Kabupaten Subang, (4) Kabupaten Indramayu, (5) Kabupaten Solok Selatan, (6) Kabupaten Lampung Timur, (7) Kabupaten Lampung Utara, (8) Kabupaten Bogor.



Gambar 21. Verifikasi Lapangan di Kabupaten Sukabumi

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

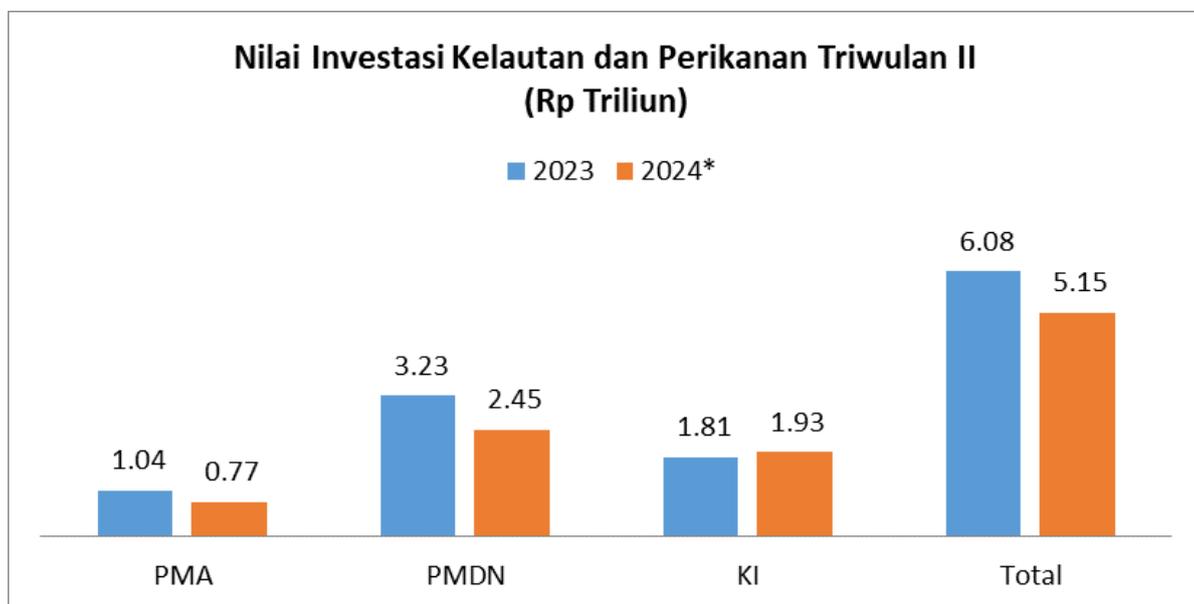
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	4,5	2,3	3,18	9	5,15	2,55	6,08	5,15	114,44	57,22	101,96	-15,30

*angka prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp5,15 triliun, yakni tercapai 114,44% jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 yang sebesar Rp4,41 triliun, atau mencapai 57,22% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp9,00 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp2,55 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 101,96% dan perlambatan 15,30% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6,08 triliun.



*angka prognosa

Gambar 22 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan II Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)

Realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp3,22 triliun atau turun 24,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp4,27 triliun. Realisasi Kredit Investasi pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp1,93 triliun atau meningkat 6,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,81 triliun.

Hongkong, R.R. Tiongkok, Malaysia adalah TOP 3 asal negara investor di Indonesia pada periode triwulan I Tahun 2024. Realisasi PMA terbesar dari Hongkong mencapai Rp 758,34 miliar (53,97%), disusul RRT Rp 164,99 miliar (11,74%), dan Malaysia Rp 148,75 miliar (10,59%). sedangkan TOP 3 lokasi tujuan investasi pada periode triwulan I adalah Maluku dengan realisasi sebesar 0,78 (20,80%) Triliun, disusul DKI Jakarta sebesar 0,50 Triliun (13,42) dan Jawa Timur sebesar 0,42 Triliun (11,12%)

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.383.485.000,- sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.454.493.493,- atau setara dengan 42,99%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

- a. Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to offer* melalui Pemetaan peluang investasi melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - 1) Survei dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Komoditas Tuna pada tanggal 12 s.d 18 Mei 2024 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;



Gambar 23 FGD Sinkronisasi Data Potensi dan Peluang Investasi Komoditas Tuna

- 2) *Benchmarking* informasi industri pengolahan tuna di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2024;



Gambar 24 Kegiatan *Benchmarking* industri pengolahan tuna di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

- 3) Penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan ikan tuna terintegrasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.



Gambar 25 Dokumen Peluang Investasi Ready to Offer Industri Pengolahan Ikan Tuna Terintegrasi

b. Promosi usaha dan investasi dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

1) *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024*

Kegiatan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024 dengan Tema yang diangkat adalah "*Sustainable Aquaculture for Food Security and Economic Growth*". Berdasarkan hasil penjangkaran minat investasi sektor kelautan dan perikanan terdapat 15 pelaku usaha dengan total rencana investasi mencapai Rp 292 milyar. Komoditas usaha yang diminati adalah Udang (39,3%), Rumput Laut (39,3%), Lobster (42,9%), Nila (21,4%), Kepiting (10,7%) dan dan Komoditas Lainnya (21,4%).



Gambar 27 Kegiatan *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024*

2) *Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024*

Kegiatan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 25 Juni 2024 dihadiri oleh 300 peserta secara luring dan 1.242 peserta secara daring pada kanal youtube kkp.go.id yang terdiri dari asosiasi, pelaku usaha penangkapan, supplier dan industri pengolahan tuna, calon investor potensial dalam dan luar negeri, perwakilan kedutaan/konsulat negara, Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan akademisi. KKP memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Wakatobi untuk ikut serta dalam pameran yang menawarkan potensi dan peluang investasi perikanan tuna kepada calon investor dengan total nilai potensi dan peluang investasi yang ditawarkan mencapai Rp 551,12 Milyar.

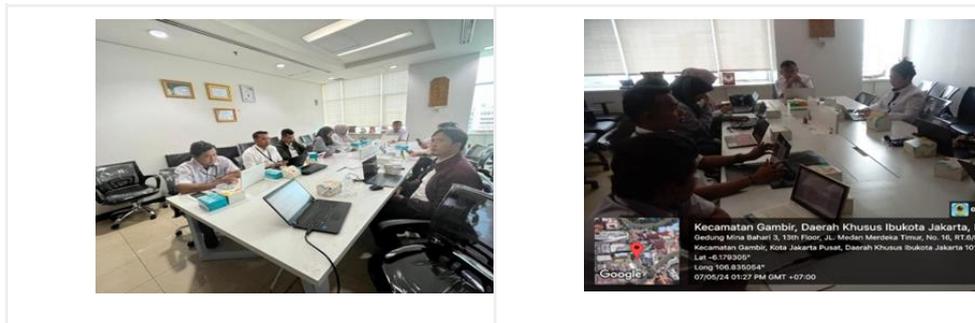
KKP juga memfasilitasi kegiatan *investment and business matching*, dengan minat terhadap peluang kerja sama investasi dan pembiayaan usaha perikanan tuna sebesar Rp 1,69 Triliun.



Gambar 28 Kegiatan *Indonesia Tuna Investment and Business Forum* (ITIBF) 2024

3) Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan

- (a) Pendampingan rencana investasi dari Brunei Darusalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia) pada hari Selasa, 7 Mei 2024 di Jakarta,



Gambar 29 Kegiatan Pendampingan rencana investasi dari Brunei Darusalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia)

- (b) Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Rapat Audiensi dan Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 29 Kegiatan Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

- (c) Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan PT. Evergreen Agriculture

Rapat fasilitasi dan pendampingan minat investasi PT. Evergreen Agriculture dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2029 di Ruang Direktur Pemasaran, Gd. Mina Bahari III, Lt.13. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Pemasaran dan diikuti oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, serta perwakilan dari PT. Evergreen Agriculture (China).

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diamanatkan pada Pasal 13 ayat 3 bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah berdasarkan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik dan pelaku usaha perikanan.

Penghitungan IKLI dilakukan dengan mengukur performa atribut berdasarkan persepsi penilaian responden dari lima dimensi pembentuk yaitu :

- a. Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan : memberikan gambaran tentang ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan produksi dan pengadaan ikan sebagai panduan untuk proses distribusi.
 - b. Dimensi Efisiensi : memberikan gambaran tingkat penggunaan sumberdaya (*resource*) dibandingkan dengan output/manfaat yang diperoleh.
 - c. Dimensi Konektivitas : memberikan gambaran terkait konektivitas sehingga pelaku logistik mendapatkan kemudahan untuk mendistribusikan barang dan proses logistik menjadi berkembang.
 - d. Dimensi Manfaat : memberikan gambaran bahwa sistem logistik memberikan nilai tambah bagi proses perencanaan dan distribusi ikan, sehingga ekonomi lokal berkembang baik, dan
 - e. Dimensi Tata Kelola : memberikan gambaran terhadap pengaruh kunci penggerak utama Sistem Logistik Ikan Nasional (SISLOGNAS) terhadap komponen Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
- b) Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Koridor logistik ditentukan dengan mempertimbangkan komoditas penentu, wilayah atau kawasan serta konektivitas antar wilayah. Penilaian IKLI tahun 2024 dilakukan pada 7 koridor logistik, yaitu:
1. Bitung – Surabaya/Jakarta
 2. Kupang – Surabaya/Jakarta
 3. Kendari – Surabaya/Jakarta
 4. Mimika – Surabaya/Jakarta
 5. Ambon – Surabaya/Jakarta
 6. Makassar – Surabaya/Jakarta
 7. Biak – Surabaya

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9	70,43	-	71,9	71,9	73,31	-	71,9	100,00	100,00	-1,92	-

Kinerja Logistik Hasil Perikanan pada tahun 2024 triwulan II mencapai 71,9. Capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 71,9 atau 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 71,9. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 73,31 maka capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,92%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil agregasi Kinerja Logistik Hasil Perikanan yang diperoleh sebesar 71,90 menunjukkan bahwa yang memiliki indeks kinerja tertinggi yaitu koridor Makassar– Surabaya/Jakarta dan Bitung - Surabaya/Jakarta dengan indeks sebesar 74,14, sedangkan koridor dengan indeks kinerja terendah yaitu pada koridor Mimika – Surabaya/Jakarta sebesar 69,19.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Kinerja Logistik Hasil Perikanan sebesar semula Rp45.921.100.000,-, sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp3.457.949.953,- atau setara dengan 7,5%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Logistik Hasil Perikanan (IKLI) selama triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) dilakukan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem

jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Pada periode triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Pembahasan pengembangan sistem Aplikasi Stelina Pembahasan Subtansi perubahan regulasi Sistem Ketelusuran dan logistic ikan yang dilaksankana pada tanggal 22 Mei 2024 di Jakarta.
- 2) Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) dilaksanakan di Kota Semarang pada tanggal 28 Juni 2024. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan DKP Prov Jateng, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Dharma Wanita DKP Prov Jateng. Materi yang disampaikan mengenai latar belakang perlunya sertifikasi mengenai ketertelusuran ikan, prinsip standardisasi oleh MSC, dan Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan Nasional.



Gambar 30 Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)

- b. Pembinaan Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pembentukan kelompok kerja SLIN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.
- c. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pemasukan Hasil Perikanan berdasarkan Neraca Komoditas dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain harmonisasi rancangan PERMEN KP tentang Perubahan atas PERMEN KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, penyusunan Analisis Kebutuhan dan ketersediaan hotel, restoran, katering, dan pasar modern, dan penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan dan Ikan Umpan, serta Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku untuk Hotel, Restoran, Katering dan Pasar Modern. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain :
 - 1) Focus group discussion pemantauan kebutuhan dan harga ikan pada hari besar keagamaan dan nasional (HKBN) ramadan dan Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 dihadiri oleh Asosiasi pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), PHRI, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bogor, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bogor dan Dinas Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia. Kegiatan dilakukan untuk memperoleh gambaran/informasiterkait ketersediaan, kebutuhan dan harga ikan menjelang hari besar keagamaan serta sebagai bahan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga ikan

bahan pangan. Secara umum dari hasil diskusi didapatkan terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan permintaan sekitar 10-20% terhadap bahan pangan ikan.

- 2) Melaksanakan pemantauan kondisi Ikan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 dan 15 Juni 2024. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan menjajaki potensi kerjasama anatar nelayan dan unit pengolahan.
- d. Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain tercapai 1 kesepakatan dalam rangka pengadaan, 2 kesepakatan dalam rangka penyimpanan, dan 2 kesepakatan dalam rangka distribusi.
- e. Pengadaan gudang beku portable merupakan tempat penyimpanan hasil perikanan pada suhu tertentu dengan atau tanpa Air Blast Freezer yang dilengkapi pondasi, atap/rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung, memenuhi persyaratan sarana untuk berproduksi yang baik, penerapan sanitasi higienis, mudah dalam pemasangan, dan dapat dipindahkan. Sarana distribusi logistik produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP mendukung Korporasi merupakan kendaraan roda empat dan/atau roda enam yang dilengkapi dengan boks berinsulasi dan mesin pendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian. Pengadaan gudang beku portable dan Sarana distribusi logistik produk KP tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (1) Desa Setono, Kota Pekalongan (2) Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi (3) Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban (4) Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang (5) Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi (6) Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang (7) Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat (8) Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe

(9) Desa Kuala Raja, Kabupaten Bireuen (10) Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan periode triwulan II Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka identifikasi dan *feasibility* mendukung program penataan kampung nelayan modern. Berdasarkan hasil revidi, evaluasi, penilaian kesiapan serta kesiapan operasionalisasi yang meliputi penilaian aspek sosial untuk tahun anggaran 2024 pelaksanaan pembangunan KALAMO sebagai modelling/percontohan hanya akan dilaksanakan di Desa Lateng Kabupaten Banyuwangi untuk KALAMO dengan pendekatan Sentra Kuliner Seafood.

- f. Fasilitasi Pengelola Gudang untuk Penerapan Sistem Resi Gudang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain inisiasi 5 calon lembaga pengelola SRG (Perumda Karya Lasinrang, CV. Anugerah Agung Global, PT Ajaib Toha, PT Asia Makmur dan PT Monster Laut Indonesia), sosialisasi Implementasi SRG ke pelaku usaha perikanan komoditas ikan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sosialisasi pembiayaan SRG komoditas rumput laut oleh Bank BJB dan BLU LPUMKP kepada pelaku usaha di Kota Palopo dan Kota Probolinggo, serta identifikasi dan pendampingan pelaku usaha perikanan komoditas ikan dan rumput laut dalam rangka rencana implementasi SRG di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatandimaksud yaitu Sosialisasi implementasi sistem resi gudang yang dilaksanakan pada tanggal 2 April di Surabaya. Kegiatan dihadiri oleh Dinas Kelautan Provinsi dan Kab/Kota, Asosiasi AP5I dan APRI serta pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semakin meningkat minat para pelaku usaha di wilayah Jawa Timur untuk menjadi Lembaga pengelola system resi gudang dalam rangka upaya peningkatan daya saing, sarana pengendalian stok nasional dan inflasi serta perluasan bisnis di sektor perikanan.



Gambar 31 Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang

g. Fasilitasi Pengelola Kapal Pengangkut dalam mendukung logistik Hasil Perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain tercapainya kesepakatan 2 lembaga pengelola kapal pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik hasil perikanan antara Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Mustika Alam 01 dengan Pemilik Kapal Penangkap Ikan Bintang Mas Terang, serta kesepakatan bersama antara Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Mustika Alam 02 dengan Pemilik Kapal Penangkap Ikan Bintang Mas Ekslusive.



Gambar 32 Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Penangkap Ikan

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (non bank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari

lembaga keuangan non bank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh *Holding Ultra Mikro*, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2024 sebesar Rp 10,26 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	2,2	1,7	4,32	10,26	3,98	1,6	3,10	3,98	180,91	38,79	148,75	28,39

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Desember 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp3,98 triliun, yakni tercapai 180,91% jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 yang sebesar Rp2,2 triliun, atau mencapai 38,79% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp10,26 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp1,6 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 148,75% dan 28,39% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3,10 triliun.

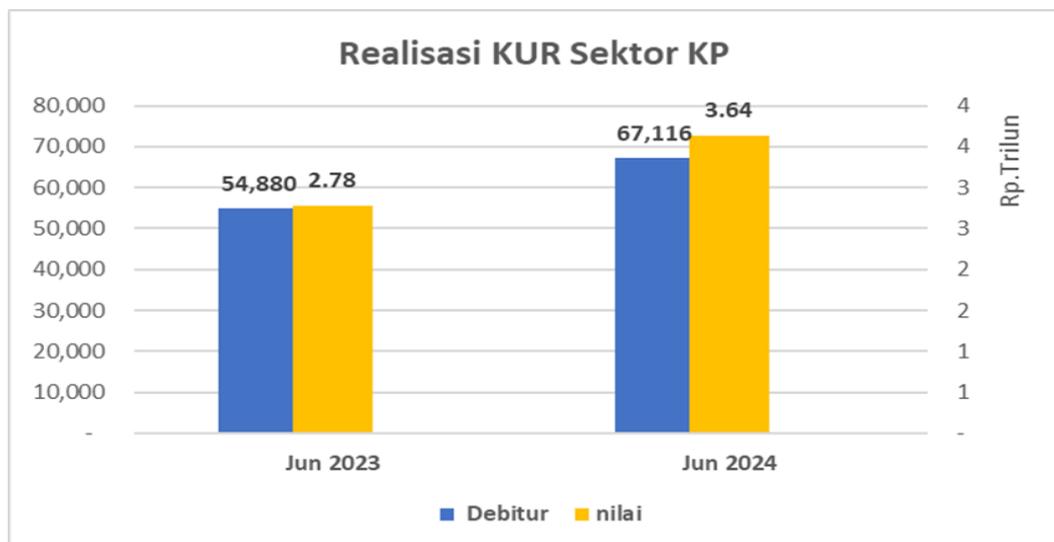
Total realisasi pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program sebesar Rp3,98 Triliun yang disalurkan kepada 131.512 pelaku usaha KP terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,63 triliun yang disalurkan kepada 67.117 pelaku usaha, dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp342 milyar yang disalurkan kepada 64.395 pelaku usaha.

Tabel 12 Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3.639.086.301.000	67.117	87,72
Ultra Mikro (UMi)	342.653.000.000	64.395	12,28
Total	3.981.739.301.000	131.512	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Kontribusi KUR terhadap nilai pembiayaan usaha sektor KP mencapai 92,30% dari capaian pembiayaan sektor KP. Realisasi KUR sektor KP pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp3,63 triliun, tumbuh sebesar 16,12% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp3,10 Miliar. Demikian pula dengan jumlah penerima KUR sebanyak 67.117 debitur pada triwulan II tahun 2024, tumbuh sebesar 22,29% dibandingkan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 54.880 debitur.



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 33. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi KUR sampai dengan periode triwulan II berdasarkan bidang usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : (1) Budidaya ikan senilai Rp1,25 Triliun (34,46%); (2) Perdagangan hasil perikanan Rp1,22 triliun (33,69%); (3) Penangkapan

ikan Rp812,09 miliar (22,32%); (4) Jasa Perikanan Rp245,70 miliar (6,75%); (5) Pengolahan hasil perikanan Rp96,05 miliar (2,64%); dan (6) Pergaraman Rp5,12 miliar (0,14%). Sedangkan realisasi kredit Ultra Mikro berdasarkan bidang usaha pada periode yang sama adalah (1) Budidaya Rp89,80 Miliar (26,20%) dan (2) Penangkapan Rp252,85 Miliar (73,80%) sebagaimana grafik dibawah ini.



Gambar 33. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan bidang usaha

Peningkatan ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP melalui kredit program diantaranya:

- a. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lembaga keuangan Bank, Non Bank dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk dapat difasilitasi kredit program.
- b. Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di Tuban dan kegiatan GISELA di Bali dan Banyuwangi
- c. Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Sukabumi, dan Provinsi Yogyakarta.

Beberapa tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan dari rekomendasi periode sebelumnya antara lain:

- a. Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan;
- b. Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah;
- c. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp14.423.500.000,- dan telah terealisasi sebesar 3.824.307.499,- atau setara dengan 26,51%.

Ditjen PDSPKP terus melakukan upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi triwulan I tahun 2023 diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP telah dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya. Sampai dengan triwulan II telah tercapai 14 lembaga.



Gambar 35 Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupate Tuban

b. Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 450 UMKM/wirausaha.



Gambar 36 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

- c. Fasilitasi pemberdayaan usaha UMKM KP melalui intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan). Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 773 UMKM/wirausaha.



Gambar 37 Fasilitasi Akses Permodalan di Tuban

- d. Fasilitasi kemitraan usaha UMKM KP melalui kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 65 UMKM/wirausaha.



Gambar 38 Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur dan Pasaran provinsi Lampung

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 13 Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	3,8	1,9	-	7,62	5,19	2,49	-	5,19	136,58	68,11	108,43	-

Nilai PNBP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 triwulan II mencapai Rp5,19 miliar. Capaian dimaksud setara dengan 136,58% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar Rp3,8 miliar atau 68,11% terhadap target tahun 2024 sebesar Rp7,62 miliar.

Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp2,49 miliar maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 108,43%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBPD Ditjen PDSPKP yaitu melakukan penyampaian laporan yang sudah disahkan kepada Biro Keuangan dan KKP dan Inspektorat Jenderal KKP secara berkala.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik di bidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 14 Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	16705	1735	-	66000	19570	1906	-	19570	117,15	29,65	926,76	-

Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP pada periode triwulan II tahun 2024 mencapai 19.570 orang atau setara dengan 117,15% terhadap target periode triwulan II tahun 2024 sebesar 16.705 orang. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 66.000 orang, maka capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah mencapai 29,65%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 1.906 orang maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 926,76%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Data capaian tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan periode triwulan II tahun 2024 diperoleh dari jumlah seluruh orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dari kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan adalah 5.135 orang dari target 5135 orang atau setara 100%;
2. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengolahan dan bina mutu adalah 10.239 orang dari target 9.540 orang atau setara 107,33%;
3. Tenaga kerja yang terlibat di bidang usaha dan investasi kelautan dan perikanan adalah 3827 orang dari target 2650 orang atau setara 144,42%.
4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang logistik kelautan dan perikanan adalah 125 orang dari target 125 orang atau setara dengan 100%. Tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi/kelompok penerima bantuan pemerintah;
5. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan adalah 83 orang dari target 50 orang atau setara dengan 166%;

Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 39 Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 15 Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	-	-	104,75	104,9	-	-	104,9	100,14	100,14	-	-

Indikator Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2024 triwulan II mencapai 104,9. Capaian dimaksud setara dengan 100,14% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 104,75 atau 100,14% terhadap target tahun 2024 sebesar 104,75. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kenaikan NTPHP semester I tahun 2024 ini dikarenakan kenaikan Indeks yang Diterima (IT) sebesar 161,42 lebih besar daripada Indeks yang Dibayarkan (IB) yaitu sebesar 154,36. Secara makro hal ini menggambarkan bahwa kenaikan harga bahan produksi dan barang konsumsi rumah tangga pengolah cenderung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga jual produk.

Laju kenaikan rata-rata bulanan Tahun 2024 Indeks yang Diterima (IT) sebesar 0,37% dan Indeks yang Dibayarkan (IB) sebesar 0,33%. Kenaikan NTPHP periode semester I tahun 2024 ini dikarenakan kenaikan IT lebih besar daripada IB. Peningkatan IT disebabkan adanya kenaikan harga jual produk olahan yang didominasi oleh kelompok olahan pengeringan/penggaraman. Kenaikan IT terjadi signifikan pada bulan Januari-April, hal ini disebabkan karena peningkatan harga jual produk ikan kering/asin

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sampai dengan Maret sebesar Rp36.742.600.000,-. Realisasi ini setara dengan 5,93% terhadap pagu anggaran sebesar Rp2.179.262.407,-.

Pada Triwulan II tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Pengadaan Pabrik Es *Portable* nelayan di lokasi kampung nelayan modern. Pabrik es *portable* adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es *portable* yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 10 Unit, sampai dengan periode triwulan II telah ditandatangani surat pesanan untuk 3 lokasi (Kabupaten Situbondo, Kabupaten Belitung, dan Kota BauBau), 2 lokasi dalam proses pemilihan penyedia. 5 unit direalokasikan untuk mendukung KALAMO dengan pendekatan Sentra Kuliner Seafood di Desa Lateng Kabupaten Banyuwangi.
- b. Pengadaan *chest freezer* sebanyak 311 unit. Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil sehingga meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga dan memberikan nilai tambah bagi UMK. Sampai dengan periode triwulan II bantuan sudah 120 unit sampai kepada penerima bantuan dan sebagian masih dalam proses pengiriman.
- c. Pengadaan peralatan pengolahan sebanyak 315 unit. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan *value added*)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan

(termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Sampai dengan periode triwulan II masih dalam proses proses pengadaan pada e-Katalog untuk usulan yang sudah diterima Ditjen PDSPKP.

- d. Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan yang disediakan sebanyak 9 unit dan 8 unit mendukung korporasi. Bantuan pemerintah ini berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. sampai dengan periode triwulan II telah ditetapkan 5 paket di Kabupaten Banda Aceh, Kabupaten Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Banyumas)
- e. Menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi antara lain (1) reviu aplikasi NTPHP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 di Bogor untuk memastikan kesiapan aplikasi NTPHP sebelum digunakan untuk kegiatan pendataan NTPHP pada 2024 dan (2) Workshop penghitungan NTPHP yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2024 di Bekasi untuk meningkatkan kemampuan enumerator dalam melakukan survei Harga produsen (HK) dan Harga Konsumen (HK) NTPHP. Kegiatan melibatkan Sekretaris Ditjen PDSPKP, Direktur PBM, BBRSEKP, staf timja Pengembangan dan Penerapan Standar Dit. PBM, Dinas Kelautan dan Perikanan dari Kab/Kota Bandung, Karawang, dan Kab. Sukabumi, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dari 40 Kab/Kota lokasi NTPHP melalui telekonferensi.



Gambar 40 Workshop penghitungan NTPHP Tahun 2024

- f. Validasi dan penghitungan NTPHP 2024 Semester I dengan tujuan untuk melakukan validasi dan analisis Indeks yang Dibayarkan (IB), Indeks yang Diterima (IT), dan NTPHP 2024 periode Semester I. Kegiatan melibatkan Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, Pusdatin, Setditjen PDSPKP, dan Direktorat PBM.



Gambar 41 Validasi dan Penghitungan NTPHP 2024 Semester I

Sasaran 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada area pembangunan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 16 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 2 unit kerja. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp807.829.200,- sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 39,48% terhadap pagu anggaran sebesar Rp2.046.334.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan Bimbingan teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN di Malang pada tanggal 3 s.d 4 Mei 2024. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Ditjen PDSPKP .



Gambar 42. Penguatan Budaya kerja ASN

- b. Melaksanakan kegiatan briefing apel pagi setiap minggu secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kinerja pegawai.

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 17 Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 3,83. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp525.959.435,- sampai dengan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 95,07% terhadap pagu anggaran sebesar Rp553.212.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Melaksanakan Evaluasi Laporan SPIP secara rutin setiap bulan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk monitoring atas kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa unit kerja masih perlu melakukan perbaikan atas uraian pada pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;

2. Pembahasan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 di Jakarta. Kegiatan bertujuan untuk menyusun Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 tingkat eselon I Ditjen PDSPKP. Laporan Triwulan I Tahun 2024 berisi pengendalian terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Keikutsertaan pada kegiatan Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 6 Juni 2024. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai tata cara penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024, memberikan pemahaman akan peran, dan fungsi tim asesor dalam Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024. Narasumber kegiatan Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi merupakan Tim dari Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Rapat persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2024. Pembahasan berupa pengisian kertas kerja maturitas SPIP terintegrasi beserta dokumen pendukungnya. Pada kertas kerja penilaian struktur dan proses terdapat subunsur yaitu: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, identifikasi risiko, analisis risiko, reviu atas kinerja, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya

dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas spi serta transaksi dan kejadian penting, informasi yang relevan, komunikasi yang efektif, pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Selain itu telah dilakukan pembentukan Tim Asesor Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Tahun 2024.



Gambar . 43 Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi

- Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP,
- Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional,

- c. Kinerja dengan bobot 30% diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja *Online* KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori, dan
- d. Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 18 Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87	-	76	87	82,29	-	78,71	82,29	94,59	94,59	-	4,55

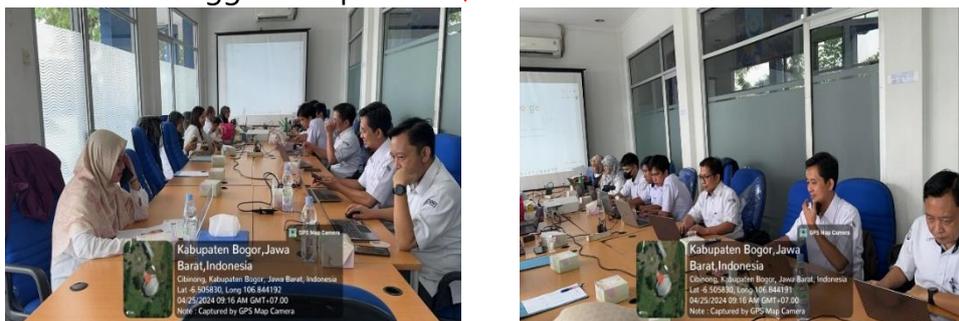
Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 triwulan II ditargetkan 87 dengan capaian 82,29. Capaian dimaksud setara dengan 94,59% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 75 dan juga target tahun 2024 sebesar 87. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya sebesar 78,71 maka capaian indikator ini mengalami peningkatan 4,55%. Indikator ini mengindikasikan kinerja ini bersifat semesteran sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMAO Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP yaitu sebesar 82,29. Nilai indeks ini menunjukkan gambaran kualitas profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 periode triwulan II kategori Cenderung Profesional/tinggi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp35.407.190.695,- sampai dengan Bulan Juni 2024.

Realisasi ini setara dengan 53,95% terhadap pagu anggaran sebesar Rp65.632.190.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 25 April 2024;



Gambar 44 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I

- b. Bimbingan teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN tanggal 3 s.d 4 Mei 2024 di Malang. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai lingkup Ditjen PDSPKP sebagai wadah pembinaan membangun karakter yang baik dan disiplin yang tinggi untuk meningkatkan kualitas diri para pegawai menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



Gambar 45 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I

- c. Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2024 dan tanggal 27 s.d 28 Mei 2024.



Gambar 46 Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan

- d. Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup PDSPKP tanggal 27 Juni 2024.



Gambar 47 Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen PDSPKP

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap penerapan SAKIP pada unit kerja eselon I KKP yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, serta

berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 19 Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 84. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3.062.357.439,- sampai dengan bulan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 41,96% terhadap pagu anggaran sebesar Rp7.297.742.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pagu Indikatif Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2024 di Jakarta. Rencana Kerja Pagu Indikatif TA 2025 disusun sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas.
- b. Pembahasan Mekanisme Penilaian SAKIP dan Penyusunan Pedoman SAKIP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Mei 2024 di Jakarta. Kegiatan

dilakukan dalam rangka persiapan implementasi evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP (PMSAKIP) lingkup Ditjen PDSPKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan Pembahasan Mekanisme dan Pedoman SAKIP Tahun 2024 dan Uji Coba Penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 48 Pembahasan Mekanisme Penilaian SAKIP dan Penyusunan Pedoman SAKIP Tahun 2024

- c. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 27 s.d 29 Mei 2024 di Jakarta. Penyusunan SBK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dimana SBK yang diusulkan berada pada tataran Rincian Output (RO).
- d. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) sebagai data dukung keterlibatan pimpinan dalam penilaian aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;



Gambar 55 Penyusunan Laporan kinerja Ditjen PDSPKP

- e. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.

14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 20 Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sifat polarisasi indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA 2024 adalah minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp257.926.000,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 40,65% terhadap pagu anggaran sebesar Rp634.526.000,00.

Ditjen PDSPKP pada periode triwulan II telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara berkala;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL Jakarta II terkait dengan perhitungan denda pembayaran sewa pemanfaatan asset PIM Muara Baru dan CS 1000 ton pada tanggal 22 April 2024.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 21 Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	80	75	80	88,64	100	92,86	88,64	110,80	110,80	-11,36	-4,54

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 125% terhadap target Triwulan I dan Target tahun

2024 yaitu 80%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 93,18%, maka capaian Triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,05%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 125%.

Realisasi investasi KP pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp5,15 triliun, yakni tercapai 114,44% jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 yang sebesar Rp4,41 triliun, atau mencapai 57,22% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp9,00 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp2,55 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 101,96% dan perlambatan 15,30% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6,08 triliun.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp389.752.990,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 76,32% terhadap pagu anggaran sebesar Rp510.692.000,00.

Pada Triwulan I 2024, Setditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan

- a. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut yang harus disiapkan. Dokumen dimaksud agar segera disiapkan agar dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>; Hasil Prosentase tindak lanjut setelah diskusi dan pembahasan yaitu adalah sebesar 88,64% dengan sisa berupa 16 rekomendasi berstatus "proses" dan 8 rekomendasi berstatus "pending";

16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 22 Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP yang disusun oleh Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 76. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp30.300.213,00. Realisasi dimaksud setara dengan 6.96% dari alokasi anggaran sebesar Rp435.560.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan Koordinasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan untuk melakukan pembahasan:
 - 1) Pemenuhan bukti dukung Penilaian Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Tahun 2023;
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik tahun 2024;
 - 3) Penyampaian usulan nama anggota Tim Pengelola Layanan Pengaduan PTSA KKP dan Pejabat Penghubung PTSP BKPM Tahun 2024;
 - 4) Pengumpulan data produk pelayanan administratif untuk disampaikan kepada Ombudsman RI; dan
 - 5) Penjajakan jabatan fungsional Penata Perizinan;

17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 23 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	100	133,33	141,84	141,84	0,00	33,33

Persentase Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 133,33% yakni tercapai 141,84% jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 yang sebesar 94%, atau 141,84% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 94%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 133,33% maka capaian ini tidak mengalami pertumbuhan dan peningkatan 33,33% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.028.850.000,-. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan II sebesar Rp1.000.909.161,- atau setara dengan 49,33% terhadap total alokasi anggaran.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan II Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator

kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 24 Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	83	-	82	93,76	89,36	-	81,88	89,36	107,66	95,31	-	9,14

Target Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 93,76, pada triwulan II indikator ini mencapai 89,36. Capaian dimaksud setara dengan 107,66% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 83 atau 95,31% terhadap target tahun 2024 sebesar 93,76. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, jika dibandingkan dengan

capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan 9,14%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp357.900.000,00 sampai dengan Bulan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 53,10% terhadap pagu anggaran sebesar Rp674.046.000,00.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan guna pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2023 antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam rapat peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam hal pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar III DIPA.
- b. Koordinasi dalam penginputan Capaian Output secara berkala;
- c. Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman III DIPA) Sekretariat Ditjen PDSPKP;
- d. Keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2024.

19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 25 Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai NKA lingkup Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 86. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat

dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.019432.000,- dengan total realisasi Rp89.801.371,- atau setara dengan 22,34%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (Dinas KP Provinsi) terkait pelaporan Capaian Output setiap awal bulan, dimana seluruh satker diwajibkan untuk menyampaikan pelaporan capaian output dalam waktu 5 hari kerja setiap bulannya.
- b) Keikursertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja serta pemantauan nilai kinerja anggaran sd bulan Mei 2024 dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.1571/SJ.2/TU.330/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 26 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp168.645.404,- sampai dengan Bulan Maret 2024 dari pagu Rp744.520.000,-. Realisasi ini setara dengan 22,65%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2023 antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pendampingan usulan penggunaan produk impor pada Satker Lingkup Ditjen PDSPKP melalui Memorandum Nomor 1431/DJPDSPKP.1/HP.660/IV/2024 Tanggal 18 April 2024 kepada Kepala BBP3KP sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Inspektur IV Inspektorat

- Jenderal KKP perihal hasil pendampingan usulan penggunaan produk impor pada Satker Lingkup Ditjen PDSPKP;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 18 April 202 di Jakarta. Agenda dalam kegiatan tersebut adalah untuk update progress pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Ditjen PDSPKP;
 - c. Melaksanakan koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Inspektorat IV dalam Implementasi P3DN Ditjen PDSPKP TW 1 TA 2024 pada tanggal 13 s.d 14 Mei 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Agenda kegiatan adalah untuk melakukan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan oleh Inspektur IV dalam hal implementasi P3DN Ditjen PDSPKP TW 1 TA 2024;
 - d. Melaksanakan korodinasi Penyiapan Dokumen Reviu Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan II Tahun 2024 pada Ditjen PDSPKP pada tanggal 10 dan 11 Juni 2024di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Agenda pada kegiatan dimaksud adalah untuk melakukan penyiapan dokumen reviu penyerapan anggaran dan realisasi pengadaan barang/jasa Triwulan II Tahun 2024;

21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;

- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 27 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP ditargetkan 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp165.562.436,00 sampai dengan Bulan Juni 2024 dari pagu Rp240.000.000,- atau setara dengan 68,98%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan secara berkala atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Melaksanakan Pembahasan Bahan Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Ditjen PDSPKP tahun 2020 – 2023 pada tanggal 29 April 2024 di Jakarta dengan melibatkan seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan Biro Perencanaan Setjen KKP. Agenda pada kegiatan dimaksud adalah upating bantuan pemerintah Ditjen PDSPKP tahun 2020-2023 yang meliputi nilai bantuan, unit bantuan, operasionalisasi bantuan, pengelola bantuan, permasalahan, dampak bantuan dan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi bantuan;



Gambar 56 Penyusunan Laporan Pemanfaatan Bantuan BP Ditjen PDSPKP

- b. Keikutsertaan dalam Penyusunan Rencana Aksi Monitoring evaluasi Program Prioritas yang diselenggarakan Biro Perencanaan pada tanggal 5 Juni 2024 di Jakarta;
- c. Keikutsertaan dalam penyusunan indikator dan instrumen monitoring dan evaluasi program prioritas yang diselenggarakan Biro Perencanaan pada tanggal 4 Juni 2024;
- d. Keikutsertaan pada rapat persiapan penilaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat Jenderal KKP yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 di Jakarta.

22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja

pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024;
- g. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- h. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 28 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW 1 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II

tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp556.000.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp202.490.982,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 36,41% terhadap total alokasi anggaran.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Cold Storage 1000 Ton Muara Baru dan Sarana Pendukungnya 16 April 2024, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada satker Sekretariat Ditjen PDSPKP dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada satker BBP3KP tanggal 2 April 2024;
- b. Melaksanakan pendampingan Survei penilaian oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta terhadap BMN berupa Cold Storage 1000 Ton di Muara Baru Jakarta;
- c. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut penghentian kerja sama raiser ikan hias Cibinong oleh BRIN dan tindak lanjut pembongkaran patung ikan koi Pada tanggal 8 Mei 2024 di Bogor yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum Setjen KKP, Biro Keuangan Setjen KKP, dan perwakilan Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP.
- d. Melaksanakan koordinasi mengadakan pertemuan pembahasan dokumen administratif dan substantif satker BBP3KP dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) di Jakarta.



Gambar 57 Rapat Pembahasan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dukung uji substansi Evaluasi Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Mei 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh tim Inspektorat IV – Itjen KKP dan seluruh perwakilan tim kerja eselon II Ditjen PDSPKP.
- f. Melaksanakan pembahasan Rencana Pemanfaatan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru pada tanggal 22 Mei 2024 di Jakarta. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut rencana pemanfaatan PIM Muara Baru setelah sudah tidak disewa oleh PT Perindo.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Pada tanggal 21 Juni 2024 di Jakarta terkait Pengelolaan Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 58 Rapat Pembahasan Pengelolaan Ikan Hias Cibinong dengan BRIN

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Dalam rangka menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasikan KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
- 2) Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasikan (X3), Bobot Nilai 30%

Tabel 29 Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	S.d TW II 2024			TW I 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024, Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP sebesar 91. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.731.129.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp350.142.562,00 atau setara dengan 20,23% terhadap total alokasi anggaran.

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama Triwulan II 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman pengumpulan dan penghitungan data utilitas dan VPO UPI Skala Menengah Besar pada tanggal 2 April 2024 di Jakarta;

- b. Melaksanakan Review Pelaksanaan Validasi Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 4 April 2024 di Jakarta;



Gambar 59 Rapat *Review* Pelaksanaan Validasi Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2023

- c. Melaksanakan Rapat lanjutan Pendataan UPI Menengah Besar pada tanggal tanggal 24 April 2024;
- d. Melaksanakan pembahasan Penghitungan VPO UPI Tahun 2023 pada tanggal 25 April 2024;
- e. Rapat Persiapan Workshop Satudata Bidang PDSPKP, tanggal 28 Mei 2024;
- f. Melaksanakan rapat persiapan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 10 s.d 14 Juni 2024;



Gambar 60 Workshop Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2024

- g. Mengikuti kegiatan Pertemuan Validator Satu Data PDS di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24-26 Juni 2024.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2024, Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp58.301.389.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp328.597.762.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp105.200.629.694,- atau setara dengan 27,19% terhadap total pagu anggaran awal atau 32,02% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2024

No	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir	Pagu Anggaran Pasca AA (Rp)	Realisasi Anggaran	% terhadap pagu awal	% terhadap pagu pasca AA
1	Pusat	332.063.886.000	49.437.929.000	282.625.957.000	165.344.397.693	49,79%	58,50%
2	UPT	38.221.254.000	3.827.715.000	34.393.539.000	2.428.409.553	6,35%	7,06%
3	Tugas Pembantuan	16.614.011.000	5.035.745.000	11.578.266.000	0	0,00%	0,00%
Total		386.899.151.000	58.301.389.000	328.597.762.000	167.772.807.246	43,36%	51,06%

Sumber: Aplikasi OmSPAN Kemenkeu Realisasi Sampai dengan Juni 2024

Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2024 terbagi menjadi kewenangan Pusat, UPT dan Tugas Pembantuan. Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp16.614.011.000,- dengan AA Rp5.035.745.000,- sehingga pagu efektif alokasi anggaran Tugas Pembantuan Rp11.578.345.266,-. Realisasi sampai dengan akhir Juni 2024 adalah sebesar 0 dikarenakan pada periode triwulan II masih dalam proses pembukaan blokir. Pengesahan revisi anggaran tugas pembantuan telah

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran pada 8 Mei 2024 sebagaimana surat Nomor: S-320/AG/AG.3/2024. Pasca pengesahan dimaksud satker tugas pembantuan dalam proses pengurusan administrasi keuangan.

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir	Pagu Anggaran Pasca AA (Rp)	Realisasi Anggaran	% terhadap pagu awal	% terhadap pagu pasca AA
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000.000	11.652.900.000	45.921.100.000	3.457.949.953	6,01%	7,53%
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	78.740.900.000	14.106.222.000	64.634.678.000	24.954.332.828	31,69%	38,61%
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100.000	9.984.869.000	61.873.231.000	71.858.100.000	100,00%	116,14%
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500.000	4.916.515.000	17.806.985.000	5.788.793.687	25,47%	32,51%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	147.402.651.000	15.035.340.000	132.367.311.000	59.285.221.225	40,22%	44,79%
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000.000	2.605.543.000	5.994.457.000	2.428.409.553	28,24%	40,51%
Total		386.899.151.000	58.301.389.000	328.597.762.000	167.772.807.246	43,36%	51,06%

Sumber: Aplikasi OmSPAN Kemenkeu Realisasi sampai dengan Maret 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020 – 2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	-	10,26
2	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	Orang	60.000	66.000

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada Triwulan II tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 105,36.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 32 Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2024 secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juni 2024 mencapai US\$125,09 miliar atau turun 2,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US\$117,19 miliar juga turun 2,99 persen.• Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Adapun rincian penurunan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar AS	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya;• Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2024 antara lain :

Tabel 33 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2024
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial; ● Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan protocol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA); ● Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping. ● Koordinasi Perundingan lannya dalam rangka perluasan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional pada tanggal 7 s.d 9 Juni 2024 di ICE BSD melalui NUSATIC 2024 yang diselenggarakan Ditjen PDSPKP sebagai host berkolaborasi dengan PT. Akuatik Flona Nusantara Kreasi. Ditjen PDSPKP menyediakan paviliun seluas 160 m2 untuk 7 (tujuh) UMKM, 3 (tiga) eksportir, SMKN 61 Kepulauan Seribu, dan Raiser Ikan Hias Cibinong. Komoditas yang dipamerkan antara lain ikan hias air tawar, ikan hias air laut, coral, aquascape, tanaman air, dan aksesoris akuarium. Selain itu juga dibuka pelayanan informasi budidaya ikan hias, Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). ● Pembahasan draft operational procedure protokol perubahan indonesia japan economic partnership agreement (IJEPA). Kegiatan dimulai dengan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka membahas draft Operational Procedure Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang dilaksanakan pada 22 April dan 19 Juni 2024 serta penyampaian counter draft OP kepada Jepang pada tanggal 22 April dan 20 Juni 2024. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan tarif bea masuk tuna olahan ke Jepang yang semula sebesar 9,6% menjadi sebesar 0% sehingga dapat meningkatkan akses pasar tuna Indonesia ke Jepang ● Pertemuan intersesi diselenggarakan pada 24 April 2024 di Serpong Tangerang. Pertemuan intersesi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan Keikutsertaan pada perundingan Akses Pasar

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2024
		<p>Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) Putaran ke-19 yang akan dilaksanakan pada 1 s.d 3 Juli 2024 di Bogor. Secara umum, UE telah menyampaikan penawaran (offer) penghapusan tarif untuk seluruh produk perikanan (532 pos tarif versi UE), baik penghapusan tarif 0% saat implementasi maupun secara gradual dalam 5 dan 7 tahun. Namun UE belum meliberalisasi 15 pos tarif olahan ikan (HS 1604) yang meliputi tuna-cakalang-tongkol, sarden, dan ikan olahan untuk surimi. Disamping akses pasar perdagangan barang, Ditjen PDSPKP juga turut mengawal perundingan dalam Working Group Rules of Origin, Trade</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Keikutsertaan pada Perundingan Intersesi ke-6 Indonesia – Tunisia Preferential Trade (IT CEPA) yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 April 2024 di Tangerang Banten. Perundingan ditargetkan untuk menyelesaikan draft text Trade in Goods (TIG), terutama untuk article on Classification of Goods and Transportation and the article on Counter Trade, Rules of Origin (RoO), dan pembahasan market access (request/offer). Terkait sektor perikanan, pihak Tunisia menyampaikan agar menambahkan 2 pos tarif olahan kepiting yaitu olahan asap (HS 03069321) dan olahan lainnya (HS 03069329)
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan; ● Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; ● Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan; ● Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; antara lain di Denpasar Bali, Tuban Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah, dan Bangka Belitung. ● Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank





**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Sulistiyo

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

**Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan**

Sakti Wahyu Trenggono

**Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Budi Sulistiyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan KP Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
		3.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	59
3	Terwujudnya pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9
		6.	Pembiayaan usaha KP melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkup Ditjen PDSPKP (unit)	2
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	87
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP	84
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP (%)	80
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	76
17.	Unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94		

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP (%)	80
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP(%)	80
		22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	91

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	159.199.000
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	78.740.900
	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100
	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	80.297.500
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500
	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000
3	Program Dukungan Manajemen	147.402.651
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	147.402.651
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		386.899.151

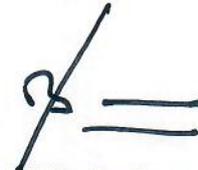
Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo